



PROGRAM DAN EVALUASI Pendidikan Keluarga

OLEH :

Warisno, S.Sos., MPd.

**Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2016



Kerangka Program Bindikkel '2016'



Pelibatan Orang Tua di Sekolah

1

Pertemuan dengan wali kelas minimal dua kali/semester



2

Mengikuti kelas orang tua (parenting) minimal dua kali/tahun



3

Hadir sebagai nara sumber dalam kelas inspirasi



4

Menyelenggarakan pentas kelas pada akhir tahun pembelajaran



SASARAN PROGRAM PER KABUPATEN/KOTA

NO JENJANG	TAHUN 2015 (100 Kab/Kota)	TAHUN 2016 (60 Kab/Kota)
1. PAUD	9 lembaga	15 lembaga
2. SD	15 lembaga	15 lembaga
3. SMP	12 lembaga	7 lembaga
4. SMA	4 lembaga	4 lembaga
5. SMK	3 lembaga	3 lembaga
6. SLB/TKLB	0 lembaga	1 lembaga
7. PNF (PKBM/SKB)	7 lembaga	5 lembaga

Materi Pendukung Tersedia di Laman: sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id

Sahabat Keluarga
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Home Tentang Kami Berita Keluarga Hebat Sekolah Keren Forum Pustaka Direktori

Terbaru

- Sri Mulyani, Kartini Masa Kini (1)
- Gol A Gong : Ayah Selalu Memfasilitasi Kegemarannya
- Gol A Gong: Orang Tua Menguatkan Mental dan Fisik Saya
- Gol A Gong: Peran Ibu dan Bapak Sangat Kuat
- Musa, Juara Internasional Penghafal Quran "Menjadi Juara Karena Didikan Keluarga"

Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang.

Selamat Hari Kartini
21 April 2016

R.A. KARTINI
Habis Gelap Terbitlah Terang

Usia PAUD
Usia SD
Usia SMP
Usia SMA/SMK
Lintas Usia

Dongeng
Lagu-lagu
Forum
Galeri
Opini/Editorial

EVALUASI: KAJIAN AWAL

Pendidikan Keluarga di Satuan Pendidikan

(Studi Kasus di 8 kab/kota)



Pentingnya Kajian Awal

untuk memperoleh informasi tentang :
(Tujuan Kajian Awal)



- Keterlibatan satuan pendidikan (SP) dan orangtua dalam pendidikan keluarga
- Kemitraan satuan pendidikan dengan pihak eksternal SP dalam melaksanakan pendidikan keluarga
- Kebutuhan orang tua dan satuan pendidikan (*need assessment*) guna melaksanakan pendidikan keluarga
- Tantangan yang dihadapi satuan pendidikan dan orangtua dalam pelaksanaan pendidikan keluarga

SAMPEL : 16 KABUPATEN/KOTA

Kab/kota yang datanya dikumpulkan dengan: FGD + kuesioner Kajian Awal Dititipi kuesioner monev DitBindikKel	Kab/kota yang datanya dikumpulkan dengan Monev Dititipi kuesioner Kajian Awal
Kab. Lombok Timur*)	Kab. Merauke
Kab Sleman	Kota Surabaya*)
Kota Palu*)	Kab Minahasa
Kota Bandung	Kota Ambon*)
Kab Agam*)	Kab Buleleng*)
Kota Pekanbaru*)	Kota Batam
Kab Kubu Raya	Kab Tangerang*)
Kota Kendari	Kota Kupang

Keterangan:

	Sudah menerima dana
	Belum menerima dana

Sumber data: Direktorat Bindikkel, 2015

HASIL/TEMUAN

KAJIAN AWAL

Keterlibatan

Satuan Pendidikan

- Sebelum adanya program dikkel, kebanyakan satuan pendidikan (SP) menerapkan dikkel dalam bentuk lain yang relevan seperti kegiatan penumbuhan budi pekerti.
- Sesudah adanya program dikkel, SP mendapat bimbingan teknis (bintek) dikkel. Selesai bintek, SP menyusun rencana dikkel (RTL) yang umumnya belum ditindaklanjuti. Diantara SP yang sudah menindaklanjuti, memperlihatkan kondisi bervariasinya kegiatan dikkel yang diadakan seperti membentuk forum/kelas orangtua.
- Peran SP dalam dikkel adalah menyosialisasikan dikkel, memfasilitasi dan menjalin komunikasi dengan orangtua, sehingga program dikkel dijalani sebagai penguat dari apa yang sudah ada.

Orangtua Peserta Didik

- Sebelum ada program pendidikan keluarga (dikkel), pertemuan antara orangtua dan SP dilakukan pada saat: (i) penerimaan peserta didik baru; (ii) pengambilan rapor; (iii) pertemuan awal tahun ajaran; (iv) konsultasi jika anak bermasalah.
- Sesudah ada program dikkel, pertemuan orangtua dengan pihak SP ditambah dengan agenda untuk mengkomunikasikan hasil bintek dikkel oleh kepala SP
- Pada umumnya SP belum memiliki kelas parenting dan kelompok/paguyuban orangtua tingkat kelas.

lanjutan



- Pendidikan keluarga lebih intensif dilakukan pada jenjang PAUD (PAUD formal maupun non formal) dibandingkan dengan satuan pendidikan (SP) lainnya. Hal ini diindikasikan antara lain dengan adanya pertemuan khusus antara orangtua dengan pihak SP yang mendiskusikan tumbuhkembang anak (lihat hasil uji beda hlm. 14).
- Efektifitas dalam arti keterlaksanaan program yang sesungguhnya belum nampak, yang ada baru pada tahap penyampaian informasi dari kepala SP kepada para pendidik dan orangtua peserta didik. Namun keterlibatan orangtua pada pendidikan non formal nampak berbeda, mengingat warga belajar yang sebagian besar tidak lagi berusia anak-anak.
- Keterlibatan SP dan orangtua dalam pelaksanaan dikkel menemui hambatan, berupa ketersediaan dana dan buku saku orangtua maupun petunjuk teknis (juknis) bagi pendidik. Buku saku dan juknis diperlukan agar penerapan dikkel dapat selaras antara orangtua dengan pihak SP
- Kondisi keterlibatan orangtua, dan pihak SP ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor lingkungan masyarakat di sekitarnya, pola pemikiran orangtua peserta didik.

KEMITRAAN

INTERNAL

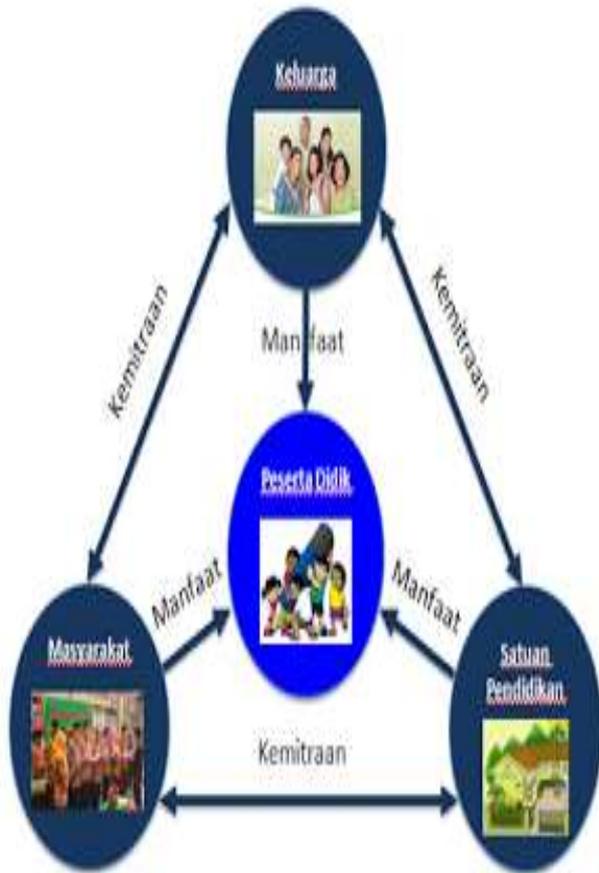
- Terjalin hubungan baik antara kepala satuan pendidikan dan pendidik dengan orangtua peserta didik (komite sekolah).
- Hubungan tersebut didasari atas kepentingan pendidikan secara umum dan belum terjadwal secara khusus dalam kegiatan bagi orangtua (parenting)

EKSTERNAL

- Terjalin kerjasama informal antara satuan pendidikan dengan pihak eksternal SP, misal dengan para alumni, instansi terkait (Puskesmas, Disdik setempat), tokoh masyarakat.
- Kemitraan yang terbangun antara SP dengan pihak eksternal masih bersifat temporer, belum rutin, dan tidak mengikat (tidak didasari oleh MoU). Karena pihak eksternal nampak belum memiliki inisiatif untuk bekerjasama dengan SP

lanjutan

Jalinan Kemitraan Keluarga-Satuan Pendidikan-Masyarakat



- Bentuk kemitraan berupa kerjasama SP dengan mengundang pihak eksternal untuk memberikan pencerahan bagi peserta didik. Selain itu, bentuk kerjasama juga berupa kontribusi pemikiran, tenaga, dan pemberian obat-obatan bagi peserta didik.
- Komunikasi yang terjalin dalam kemitraan tersebut telah berjalan dengan efektif, yang ditandai dengan adanya penguatan hubungan komunikasi dua arah (timbang balik)
- Hambatan dalam kemitraan dikel terutama dikarenakan belum adanya payung hukum dikel (regulasi). Faktor yang mempengaruhi aspek kemitraan ini antara lain adalah kerjasama yang tidak mengikat (belum di dasari MoU)

TANTANGAN dalam Pelaksanaan Pendidikan Keluarga



Terdapat empat tantangan besar yang dihadapi dalam melaksanakan pendidikan keluarga melalui satuan pendidikan.

- *Pertama* adalah menemukan strategi pendidikan keluarga yang tepat untuk mengatasi keragaman karakteristik orangtua terkait kemauan dan kemampuan orangtua membina karakter anaknya, termasuk strategi dikkel bagi ortu yang anaknya kos.
- *Ke dua* adalah mengatasi pengaruh berbagai faktor di luar sekolah dan rumah dalam membentuk karakter anak. Faktor-faktor tersebut adalah bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter yang ditanamkan di sekolah dan rumah yang diserap anak melalui televisi, internet (yang diakses anak melalui ponsel maupun warnet).
- *Ketiga* adalah menumbuhkan kepedulian Pemda, terutama bagi Pemda kab/kota dan provinsi yang menjadi atasan langsung Dinas Pendidikan provinsi/ kab/kota. Dalam pelaksanaan kegiatan, Dinas Pendidikan harus mendapat persetujuan dari Pemda provinsi/kab/kota, terutama terkait dengan aspek tenaga dan sarana, dan anggaran.
- *Ke empat* adalah menerbitkan payung hukum dalam rangka pelaksanaan pendidikan keluarga berupa antara lain SK Bersama antara K/L terkait

KEBUTUHAN dalam penerapan Dikkel

Satuan Pendidikan

- Pendanaan sesuai kebutuhan SP
- Sarana berupa juknis/acuan dikkel, jaringan wifi sehingga laman “sahabat keluarga” dapat diakses, ruangan khusus orangtua, ruang tunggu.
- Tenaga pengawas yang paham dan kompeten dalam pendidikan keluarga

Orangtua

- Buku panduan/buku saku orangtua dan buku-buku dikkel, informasi tertulis lainnya
- Sarana/media komunikasi ortu dengan pihak SP
- Bintek, alat/permainan dikkel guna memfasilitasi pemahaman ortu akan pendidikan keluarga

SIMPULAN

1. Keterlibatan SP dalam menerapkan dikkel sebelumnya cenderung sudah ada melalui kegiatan rutinitas SP (akademik) dan penanaman budi pekerti (karakter) di kalangan peserta didik, sehingga pelaksanaan program dikkel saat ini merupakan penguat dari apa yang sudah ada sebelumnya (formalitas).

2. Kemitraan antara satuan pendidikan dengan pihak eksternal SP yang terbangun selama ini belum rutin, masih bersifat temporer dan tidak mengikat (tidak didasari MoU)

3. Tantangan yang harus diminimalisir dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan dikkel adalah ketersediaan legalitas (payung hukum) dan pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan SP, orangtua & masyarakat

SARAN-SARAN (REKOMENDASI)

1. Perlu penguatan komitmen dalam keterlibatan dan kemitraan pihak-pihak terkait (satuan pendidikan, orangtua, masyarakat/organisasi mitra) dalam pelaksanaan dikkel dengan mengeluarkan payung hukum/regulasi yang mengikat (seperti SK Bersama antar K/L terkait, Permendikbud tentang pendidikan keluarga dan Perda tentang pelaksanaan dikkel di satuan pendidikan)
2. Rancangan pelaksanaan pendidikan keluarga perlu dibedakan sesuai dengan karakteristik orangtua, nilai sosial budaya masyarakat setempat, jenjang dan jenis pendidikan seperti pendidikan non formal (PKBM/SKB/LPK). Karena tidak semua peserta didik PNF merupakan anak usia sekolah, bahkan peserta didik pada satuan pendidikan non formal ada yang berstatus orang tua.
3. Organisasi mitra diharapkan berperan aktif dalam pelaksanaan pendidikan keluarga dengan menyumbangkan dana, daya, pikiran, tenaga, dan bentuk lainnya, sehingga pelaksanaan pendidikan keluarga di satuan pendidikan dapat terjamin keberlanjutannya. Salah satu caranya adalah satuan pendidikan memasukkan program pendidikan keluarga ke dalam rencana kegiatan organisasi mitra (sebagai strategi kemitraan mutualisme)

lanjutan

4. Kesepakatan antara satuan pendidikan dengan organisasi mitra perlu dilakukan secara formal (dengan adanya MoU), khususnya terkait dengan upaya memperoleh dukungan dana dalam memenuhi sarana bagi penyelenggaraan pendidikan keluarga.
5. Untuk meminimalisir tantangan yang ditemui di kalangan orangtua, maka unsur orangtua yang diwakili oleh komite sekolah perlu diikutsertakan dalam bintek dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga.
6. Diperlukan pengaturan tayangan acara televisi dan akses media informasi lainnya dalam upaya membatasi tayangan yang tidak layak untuk dikonsumsi anak, khususnya bagi anak usia sekolah dan belum sekolah.
7. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelaksanaan pendidikan keluarga, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga diminta untuk bekerjasama/bermitra dengan pihak K/L lain yang terkait, seperti BKKBN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial agar masing-masing pihak dapat berkontribusi dalam rangka membangun ekosistem pendidikan keluarga.



Atas perhatian Bapak/Ibu